



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan- yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di digunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, untuk itu kami akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas dukungannya, kerjasamanya dan dengan telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Pelaihari, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* **ASN BerAKHLAK** (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**) dan *Employer Branding* **Bangga Melayani Bangsa**, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

1.1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.1.1.2 Struktur Organisasi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, **Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut NOMOR 114 TAHUN 2021 Pasal 4, Ayat 3 susunan Organisasi terdiri atas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2023 berdasarkan Jabatan Struktural, JFT, JFU/Pelaksana berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang, 1 (satu) orang PPPK dan 143 (seratus empat puluh tiga) orang Non PNS/PTT, yang meliputi :

1. Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2. Asisten	:	3	Orang
3. Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4. Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5. Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9. Kepala Bagian Umum	:	1	Orang
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11. Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1	Orang
13. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
14. Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
15. Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1	Orang



17. Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
18. JFU/ JFT/Pelaksana	:	78	Orang
19. P3K	:	1	Orang
20. Non PNS		143	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang
Per 31 Desember 2023

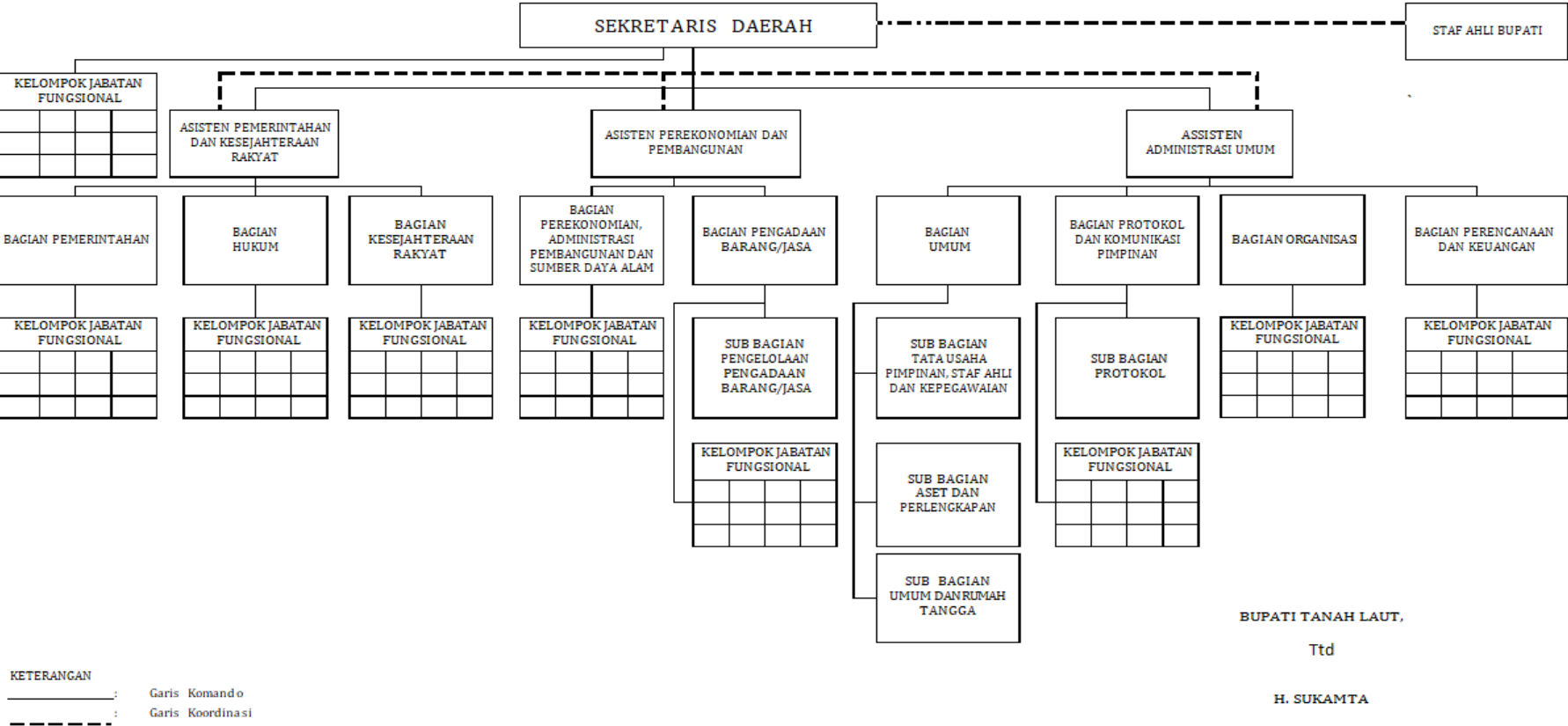
NO	BAGIAN	GOLONGAN																	JML
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																	1
2	Asisten Sekretaris Daerah		3																3
3	Staf Ahli		2		1														3
4	Pemerintahan			1		1	1	1		2									6
5	Hukum			1		1	1	2										1	7
6	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	3										7
7	Pengadaan Barang/Jasa				2	8	3	2	3	3									21
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2	1		1										5
9	Umum				1	1	2	4	5	4	1		2	1	1				22
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	4	1									9
11	Organisasi			1		2		3	1										7
12	Perencanaan dan Keuangan			1		2		1	3	2									9
JUMLAH		1	5	4	7	19	10	16	20	12	1	-	2	1	1	-	-	1	100

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
 berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda		3								3
3	Staf Ahli			3							3
4	Pemerintahan		2	2		1		1			6
5	Hukum		1	5		1					7
6	Organisasi			7							7
7	Pengadaan Barang Jasa		2	15		3		1			21
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		3	1		1					5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			4		2		12	1	3	22
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4			1	4			9
JUMLAH		-	13	49	-	11	1	22	1	3	100

* Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023



BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. Rp. 85.460.903.356,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 78.850.708.747,00** (Capaian 92.27%)

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	1.503.669.876	1.366.611.561	90.89%
2	Hukum	2.229.556.766	1.625.809.811	72.92%
3	Organisasi	522.274.530	435.682.009	83.42%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	724.329.579	585.280.050	80.80%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.392.152.439	1.084.222.634	77.88%
6	Kesejahteraan Rakyat	34.804.336.890	33.317.495.150	95.73%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.329.521.582	1.217.231.423	91.55%
8	Umum	19.532.460.840	18.325.249.158	93.82%
9	Perencanaan dan Keuangan	23.422.600.854	20.893.126.951	89.20%
	JUMLAH	85.460.903.356	78.850.708.747	92.27%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.749.891	20.862.989	15.696.200	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	14.999.529	12.064.700	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	22.961.218.512	22.661.218.512	20.183.402.971	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	14.999.893	15.209.545	11.175.600	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000	30.000.000	0	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	61.704.905	86.705.585	82.066.500	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.514.628	1.299.159.669	1.215.531.386	Umum
		- Penyedia Peralatan Rumah Tangga	75.822.034	124.240.667	96.542.900	Umum
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	43.454.423	67.624.914	60.410.990	Umum
		- Penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	14.820.000	Umum
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	6.480.000	16.200.000	6.275.000	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.314.600.000	4.814.600.000	4.457.108.602	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.674.000.000	1.590.715.747	Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.582.310	2.129.581.560	1.840.270.201	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.362.939.601	3.695.189.983	3.628.988.218	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.896.500	329.793.000	326.865.589	Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.740.000	1.746.620.000	1.746.410.598	Umum
		- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	241.812.064	306.654.064	304.924.250	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.826.560	358.211.581	357.851.077	Umum
		- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	817.592.612	710.310.279	670.757.480	Perencanaan dan Keuangan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	138.379.817	120.782.250	Umum
		- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	631.990.000	789.940.000	681.221.000	Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	419.990.000	343.384.000	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.490.570.000	1.451.080.850	Umum
		- Kegiatan Penataan Organisasi				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.427.697	102.472.697	95.815.300	Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	124.754.512	124.754.512	85.217.862	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	295.047.321	254.588.847	Organisasi
		- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	189.640.028	487.150.560	445.113.123	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	265.883.641	376.842.278	349.788.200	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian	205.515.838	465.528.744	422.330.100	Protokol dan



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Tugas Pimpinan				Komunikasi Pimpinan
		- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	174.535.403	671.925.147	638.602.000	Pemerintahan
2	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	216.916.270	270.501.270	217.838.271	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	207.496.995	301.768.194	271.381.868	Pemerintahan
		- Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	149.928.665	259.475.265	238.789.422	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	9.217.255.530	9.285.373.530	8.921.864.464	Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.392.598.317	21.392.598.317	20.972.958.226	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.137.404.825	4.126.365.043	3.422.672.460	Kesejahteraan Rakyat
		- Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum				Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	584.439.643	902.546.592	734.031.291	Hukum
		Fasilitas Bantuan Hukum	297.667.972	938.580.578	577.948.224	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	268.095.055	388.429.596	313.830.296	Hukum
		- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	246.893.160	297.915.910	190.315.020	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian dan distribusi perekonomian	74.586.909	143.226.359	126.616.528	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	213.707.500	237.426.710	223.171.250	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	45.760.600	45.760.600	45.177.252	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	649.706.599	670.026.599	442.424.156	Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	224.540.658	285.598.545	279.597.500	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	436.527.295	436.527.295	362.200.978	Pengadaan Barang/Jasa

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun , Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu Strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

- i. **Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 80.8** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
	a.	
	b.	
	c.	
	d.	
	Total pemanfaatan sistem pengadaan	23.50
2.	Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	17.30
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	Total capaian ITKP	80.80

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarkan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;

- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

ii. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	7 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	13 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan	3

	Barang/Jasa Madya	
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 13 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

iii. Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tanah Laut

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

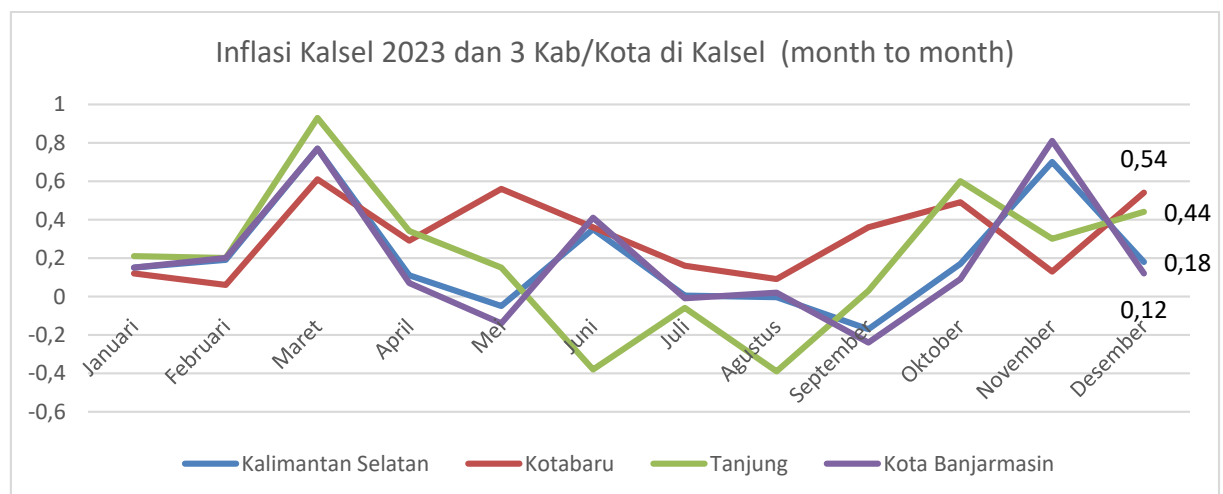
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak

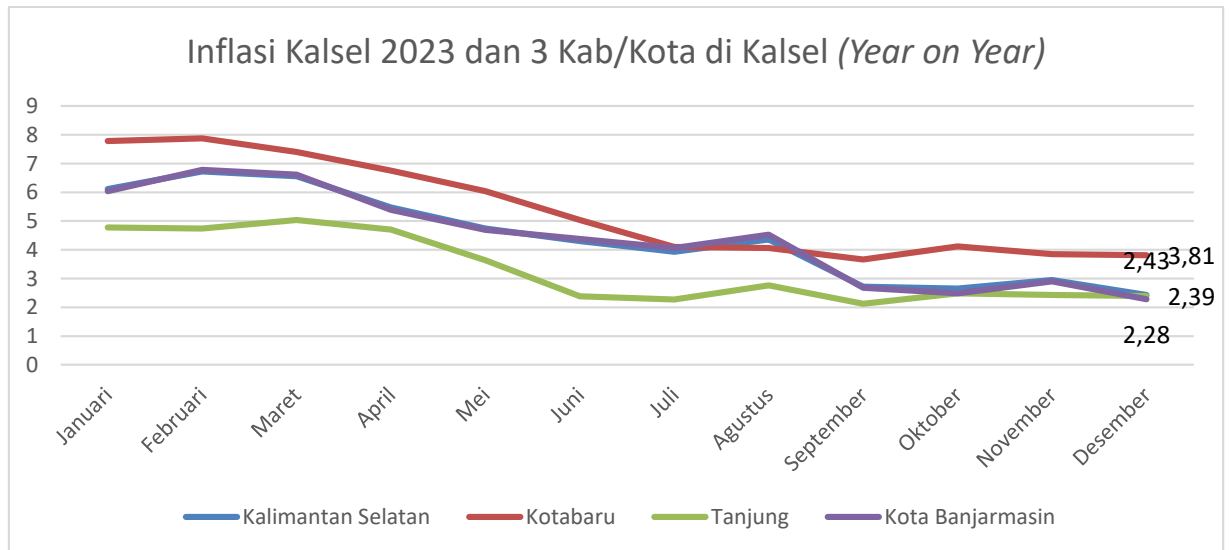
stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2023 bukan sebagai Kabupaten penghitung inflasi di Kalimantan Selatan dan pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut ditambahkan sebagai Kabupaten Penghitung Inflasi di Kalimantan Selatan bersama dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun kota penghitung inflasi di Kalimantan selatan yang sudah ada adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru. Inflasi Kabupaten Tanah Laut selama ini digunakan adalah inflasi Kota Banjarmasin.

Berikut adalah trend inflasi selama tahun 2023 untuk provinsi kalsel dan 3 Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan

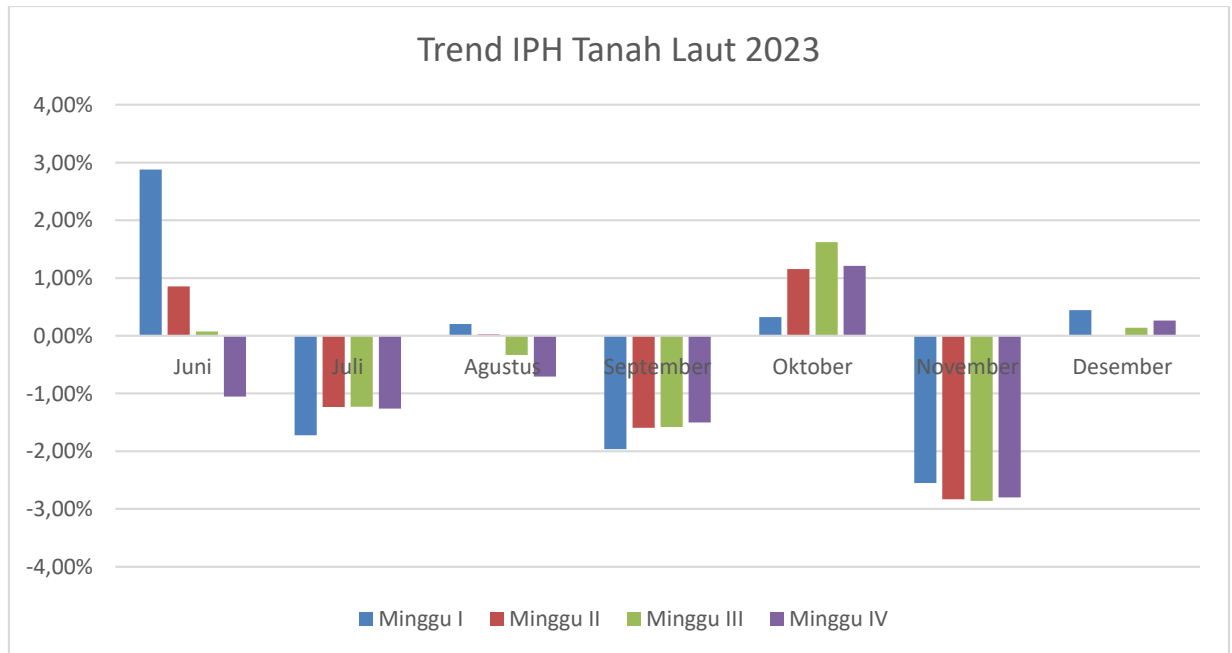




Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 Kab/Kota di Kalimantan Selatan sudah selaras dengan tingkat inflasi nasional 2,61%, kecuali Kabupaten Kota Baru yang angka inflasinya masih diatas angka provinsi dan nasional yaitu 3,81%.

Walaupun bukan sebagai penghitung inflasi, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 adalah salah satu Kabupaten yang dihitung IPH nya (baca, Indeks Perubahan Harga). IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. IPH memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan dipahami. IPH dihitung oleh BPS RI dengan sumber data dari dinas perdagangan setempat.

20 komoditas yang termasuk dalam penghitungan IPH adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, kangkung, bayam, wortel, tomat, pisang, dan jeruk. Masing-masing komoditas memiliki bobot masing-masing, dengan bobot terbesar adalah beras (28.50%), daging ayam ras (10.14%), dan telur ayam ras (7.86%). Berikut adalah trend IPH Tanah Laut dalam 6 bulan terakhir.



permasalahan – permasalahan yang muncul dalam rangka menjaga IPH Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- A. Beberapa komoditi yang dihitung IPH nya berasal dari luar daerah seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.
- B. Beberapa komoditi bahan pangan yang dihasilkan di Tanah Laut tapi harganya masih tidak bisa dikendalikan karena tergantung dari harga korporasi (daging ayam ras dan telur ayam ras).
- C. Hasil pertanian di Kabupaten Tanah Laut masih banyak yang keluar daerah dan harga di internal Kabupaten Tanah Laut masih tergantung harga pasar di luar daerah.
- D. Tidak adanya pedagang besar yang dapat bertindak sebagai agen, sehingga kerjasama antar daerah sulit untuk dilaksanakan.
- E. Supply data pergerakan IPH dan komoditi pendorong IPH masih lambat dari BPS sehingga antisipasi dari Pemerintah Daerah sering terlambat.

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Optimalisasi kegiatan monitoring stock dan harga bapak penting yang masuk dalam perhitungan IPH untuk memastikan ketersediaan dan harga yang stabil.

- 2) Secara rutin melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dilokasi prioritas daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
- 3) Merancang penggunaan BTT untuk kegiatan pengendalian IPH dan inflasi di tahun 2024
- 4) Mengkaji pemanfaatan koperasi sebagai offtaker bahan pokok, khususnya menyerap hasil pertanian agar tidak semua kelaur daerah dan dapat mengontrol harga di dalam daerah
- 5) Mendorong koperasi untuk menjadi agen bahan pokok yang berasal dari luar daerah.

Pengendalian laju dan tingkat inflasi memiliki peran vital dalam bidang makroekonomi. Keberhasilan pengendalian inflasi menjadi sangat penting karena dampak dari inflasi akan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama saat inflasi berada pada tingkat tinggi dan tidak stabil mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi harus tetap dijaga sesuai dengan range target yang ditetapkan, hal ini sangatlah penting karena inflasi yang tinggi pada suatu daerah akan menggerus pertumbuhan ekonominya.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan inflasi yang rendah dan stabil maka kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik. Inflasi yang rendah dan stabil akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Kenaikan harga yang diciptakan oleh inflasi akan menstimulasi pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka dikarenakan keuntungan yang diharapkan oleh mereka menjadi lebih besar. Peningkatan produksi berarti menimbulkan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain

dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; 6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ; 7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; 8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan 9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan; 4) Fasilitasi kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan; 5) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama; 6) Fasilitasi pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama; 7) Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji; 8) Fasilitasi pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama); 9) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 10) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 11) Fasilitasi Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah; 12) Fasilitasi pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan 13) Fasilitasi Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI



NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		Kabupaten Tanah Laut.
3.	Pelayanan Bagian Pemerintahan	1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah; 3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD; 4) Fasilitasi Kegiatan <i>Coffe Morning</i> ; 5) Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten; 6) Fasilitasi Penyusunan LKPJ/LPPD; 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan 8) Fasilitasi Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah; 2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah; 3) Fasilitasi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; 4) Fasilitasi kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah; 5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah; 6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah; 7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM; 8) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral; 9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan; 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain); 11) Fasilitasi kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan 12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
5.	Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Memfasilitasi Protokol Kegiatan Pimpinan; 2) Memfasilitasi Protokol Tamu Daerah; 3) Memfasilitasi Pembuatan Viedo Pimpinan; 4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan; 5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan 6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.
6.	Pelayanan Bagian Hukum	1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; 2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM; 3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan 4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.
7.	Pelayanan Bagian Umum	1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung; 2) Memfasilitasi Penyewaan Bus; 3) Pelayanan Tamu Daerah; 4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat; 5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan 6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	1) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab; 4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD;



NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		5) Pembuatan ID Card Pegawai; 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 7) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 8) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
9.	Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan; 2) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah; 3) Fasilitasi Penyusunan Renja Sekretariat Daerah; 4) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Keuangan; 5) Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko; dan 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

1.1.2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang **"BERINTERAKSI"**

- ❖ **Berkarya**
- ❖ **Inovasi**
- ❖ **Tertata**
- ❖ **Religius**

- ❖ **Aktual**
- ❖ **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
4. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan Organisasi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk Renstra Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah :

1. Tujuan Strategis

- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
- c. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.

1. Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Organisasi.
- b. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim.
- c. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Adm. Pembanguann dan SDA, dan Bagian Pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25.

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81.5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKP D/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
Membangun tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan

yang baik (Good Governance)	yang baik			Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	83	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Kewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan

			Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
			Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
			Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
				Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
			Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan

	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	dan Pelaporan		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Peresentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	83	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92-	Bagian Umum

					Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	5%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum

Informasi Hukum			Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Ta mu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat

	evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat		Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												76.738.502.712	85.460.903.356			82.265.529.667
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												38.200.442.316	44.806.857.806			38.115.153.099
					Bagian Perencanaan dan Keuangan												23.824.560.437	23.422.600.854			
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												30.749.420	35.862.518			33.750.000
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.749.891	20.862.989	IKM	83 Nilai	18.000.000	
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	14.999.529	14.999.529	IKM	83 Nilai	15.750.000	

4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22.976.218.405	22.676.428.057				23.026.230.713	
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	110 Orang/Bulan	118 Orang/Bulan	100 Persen	100 Persen	22.961.218.512	22.661.218.512		IKM	83 Nilai	23.010.480.713
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	IKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	14.999.893	15.209.545		IKM	83 Nilai	15.750.000
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										817.592.612	710.310.279				1.057.701.917	
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Persentase capaian kinerja di Bagian Keuangan dan Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100 Persen	100 Persen	817.592.612	710.310.279		IKM	83 Nilai	905.027.009
					Bagian Umum										13.192.567.842	19.532.460.840					
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30.000.000	30.000.000				33.000.000	

4	01	01	2,05	07	Pemula ngan Pegaw ai yang Menin ggal dalam Melaks anakan Tugas	IKM	Jumlah Laporan Hasil Pemula ngan Pegawai yang Mening gal dalam Melaksa nakan Tugas	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	30.000.000	30.000.000		IKM	83 Nilai	33.000.000
4	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												3.683.575.990	6.423.530.835				1.296.121.013
4	01	01	2,06	01	Penyed iaan Kompo nen Instalas i Listrik/ Penera ngan Bangu nan Kantor	IKM	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an Kantor yang Disediak an	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	61.704.905	86.705.585		IKM	83 Nilai	72.701.079
4	01	01	2,06	02	Penyed iaan Peralat an dan Perlen gkapan Kantor	IKM	Jumlah Paket Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	166.514.628	1.299.159.669		IKM	83 Nilai	117.518.717
4	01	01	2,06	03	Penyed iaan Peralat an Rumah Tangga	IKM	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	75.822.034	124.240.667		IKM	83 Nilai	83.412.277

4	01	01	2,06	05	Penyed iaan Barang Cetaka n dan Pengg andaan	IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengg andaan yang Disediak an	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	43.454.423	67.624.914		IKM	83 Nilai	47.800.940
4	01	01	2,06	06	Penyed iaan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- undan gan	IKM	Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undang an yang Disediak an	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000		IKM	83 Nilai	16.500.000
4	01	01	2,06	08	Fasilita si Kunjun gan Tamud	IKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamud	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	10 Laporan	25 Laporan	100 Persen	100 Persen	6.480.000	16.200.000		IKM	83 Nilai	7.128.000
4	01	01	2,06	09	Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsult asi SKPD	IKM	Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	400 Laporan	400 Laporan	100 Persen	100 Persen	3.314.600.000	4.814.600.000		IKM	83 Nilai	951.060.000
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											5.321.521.911	7.498.771.543				5.809.818.048
4	01	01	2,08	02	Penyed iaan Jasa Komun ikasi, Sumbe r Daya Air dan	IKM	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah	83 Nilai	83 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.674.000.000	1.674.000.000		IKM	83 Nilai	1.841.400.000

					Listrik		dan Listrik yang Disediak an		an												
4	01	01	2,08	03	Penyed iaan Jasa Peralat an dan Perlen gkapan Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	100 Persen	284.582.310	2.129.581.560		IKM	83 Nilai	313.156.987
4	01	01	2,08	04	Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disediak an	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	3.362.939.601	3.695.189.983		IKM	83 Nilai	3.655.261.061
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.918.275.124	2.741.278.645				2.891.205.420
4	01	01	2,09	01	Penyed iaan Jasa Pemeli haraan, Biaya Pemeli haraan, dan Pajak Kendar aan Perora ngan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n	IKM	Jumlah Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajakny a	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	5 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	246.896.500	329.793.000		IKM	83 Nilai	271.586.150

4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	46 Unit	78 Unit	100 Persen	100 Persen	1.149.740.000	1.746.620.000	IKM	83 Nilai	889.614.000
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	7 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	241.812.064	306.654.064	IKM	83 Nilai	266.262.770
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	279.826.560	358.211.581	IKM	83 Nilai	309.936.000
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											138.379.817	138.379.817			1.057.701.917
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Persentase capaian kinerja di Bagian Keuangan dan Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	3 Paket		100 Persen	100 Persen	138.379.817	138.379.817	IKM	83 Nilai	152.674.908

					Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan														
4	01	01	2,12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										2.100.815.000	2.700.500.000				1.256.750.000	
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	IKM	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	631.990.000	789.940.000		IKM	83 Nilai	640.200.000
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	419.990.000	419.990.000		IKM	83 Nilai	407.000.000
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	IKM	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	3 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	1.048.835.000	1.490.570.000		IKM	83 Nilai	209.550.000
					Bagian Organisasi										522.274.530	522.274.530					
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi										522.274.530	522.274.530				560.000.000	

4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	IKM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase capaian kinerja di Bagian Organisasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	40 Dokumen	40 Dokumen	100 Persen	100 Persen	102.472.697	102.472.697	IKM	83 Nilai	160.000.000
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	IKM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase capaian kinerja di Bagian Organisasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	124.754.512	124.754.512	IKM	83 Nilai	200.000.000
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	IKM	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja di Bagian Organisasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	295.047.321	295.047.321	IKM	83 Nilai	200.000.000
					Bagian PROK OPIM											661.039.507	1.329.521.582			
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											661.039.507	1.329.521.582			2.150.575.988
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keptrokokolan	IKM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptrokokolan	Persentase capaian kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	480 Laporan	480 Laporan	100 Persen	100 Persen	189.640.028	487.150.560	IKM	83 Nilai	504.108.165
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	IKM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian kinerja di	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan	83 Nilai	83 Nilai	480 Laporan	480 Laporan	100 Persen	100 Persen	265.883.641	376.842.278	IKM	83 Nilai	1.016.728.515

					an		kasi Pimpina n	Bagian Protokol dan Komuni kasi Pimpina n	an, Semua Kelurah an												
4	01	01	2,14	03	Pendok ument asian Tugas Pimpin an	IKM	Jumlah Laporan Pendok umentas ian Tugas Pimpina n	Persent ase capaian kinerja di Bagian Protokol dan Komuni kasi Pimpina n	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	83 Nilai	83 Nilai	480 Laporan	480 Laporan	100 Persen	100 Persen	205.515.838	465.528.744		IKM	83 Nilai	629.739.308
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										36.646.337.675	38.537.563.532				41.313.774.774	
					Bagian Pemer intahan										748.876.333	1.503.669.876					
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan										598.947.668	1.244.194.611				888.000.000	
4	01	02	2,01	01	Penata an Admini strasi Pemer intahan	Peningk atan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokume n Hasil Penataa n Adminis trasi Pemerin tahan	Persent ase capaian kinerja di Bagian Pemerin tahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	3,1750 Skor	3,1750 Skor	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	174.535.403	671.925.147		Penin gkata n Nilai LPPD (skor)	3,1750 Skor	288.000.000
4	01	02	2,01	02	Pengel olaan Admini strasi Kewilay ahan	Peningk atan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokume n Hasil Pengelo laan Adminis trasi Kewilay ahan	Persent ase capaian kinerja di Bagian Pemerin tahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	3,1750 Skor	3,1750 Skor	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen	100 Persen	216.916.270	270.501.270		Penin gkata n Nilai LPPD (skor)	3,1750 Skor	385.000.000
4	01	02	2,01	03	Fasilita si Pelaksa naan Otonom i Daerah	Peningk atan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pelaksa naan Otonom i Daerah	Persent ase capaian kinerja di Bagian Pemerin tahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	3,1750 Skor	3,1750 Skor	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	207.495.995	301.768.194		Penin gkata n Nilai LPPD (skor)	3,1750 Skor	215.000.000

4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah										149.928.665	259.475.265				165.000.000	
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase capaian kinerja di Bagian Pemerintahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,1750 Skor	3,1750 Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	149.928.665	259.475.265		Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1750 Skor	165.000.000
					Bagian Kesejahteraan Rakyat										34.747.258.672	34.804.336.890					
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										34.747.258.672	34.804.336.890				39.600.000.000	
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	111 Dokumen	112 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9.217.255.530	9.285.373.530		IKM	83 Nilai	11.000.000.000
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	3310 Orang	3310 Orang	100 Persen	100 Persen	21.392.598.317	21.392.598.317		IKM	83 Nilai	24.200.000.000

							Anak, Adminis trasi Kepend udukan Dan Pencata tan Sipil, Pember dayaan Masyara kat dan Desa, Pengen dalian Pendud uk dan KB													
4	01	02	2,02	03	Pelaksa naan Kebijak an, Evaluas i, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejaht eraan Masyara kat yang Meliputi Urusan Kepemu daan dan Olahrag a, Pariwisa ta, Pendidi kan, Kebuda yaan, Perpust akaan, Kearsipa n, Trantibu m Linmas	IKM	Jumlah Dokume n Hasil Kebijaka n, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejaht eraan Masyara kat yang Meliputi Urusan Kepemu daan dan Olahrag a, Pariwisa ta, Pendidi kan, Kebuda yaan, Perpust akaan, Kearsipa n, Trantibu m Linmas	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Pelayan an Kesejaht eraan Rakyat	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4.137.404.825	4.126.365.043	IKM	83 Nilai	4.400.000.000

					Bagian Hukum										1.150.202.670	2.229.556.766					
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										1.150.202.670	2.229.556.766	660.774.774				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasi Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	180 Dokumen	180 Dokumen	100 Persen	100 Persen	584.439.643	902.546.592		Terfasilitasi Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	266.265.788
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terfasilitasi Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Kasus	10 Kasus	100 Persen	100 Persen	297.667.972	938.580.578		Terfasilitasi Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum	100 %	209.468.575

																		m Daera h			
4	01	02	2,03	03	Pendok ument asian Produk Hukum dan Pengel olaan Inform asi Hukum	Terfasilit anya Penyusu nan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikas i Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelo laan Informa si Hukum yang Didoku mentasi	Persent ase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	100 %	100 %	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100 Persen	100 Persen	268.095.055	388.429.596		Terfasi litanya Penyu sunan produ k huku m daera h/ lainny a / Bantu an Huku m dan HAM, Publik asi Produ k Huku m Daera h	100 %	185.040.411
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											1.891.722.721	2.116.482.018			2.836.601.794	
					Bagian Perekonomian											580.948.169	724.329.579				
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											535.187.569	678.568.979			605.000.000	
4	01	03	2,01	01	Koordi nasi, Sinkro nisasi, Monito ring dan Evaluas i Kebijak an Pengel olaan BUMD	persent ase Cakupa n Pembin aan dan Pengem bangan Potensi Perekon omian daerah	Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi, Sinkroni sasi, Monitor ing dan Evaluasi Kebijaka n Pengelo laan	Persent ase capaian kinerja di Bagian Perekon omian, Adm Pemban gunan dan SDA	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	100 %	100 %	0 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	246.893.160	297.915.910		perse ntase Cakup an Pembi naan dan Penge mban gan Poten si Perek onomi	100 %	275.000.000

					dan BLUD		BUMD dan BLUD												an daera h		
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase capaian kinerja di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA		100 %	100 %	0 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	74.586.909	143.226.359		persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah	100 %	82.500.000
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase capaian kinerja di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	213.707.500	237.426.710		persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah	100 %	247.500.000	
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											45.760.600	45.760.600			170.000.000		
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Persentase capaian kinerja di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	45.760.600	45.760.600		persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi	100 %	120.000.000

						daerah	Pembangunan	dan SDA											si Perekonomian daerah		
					Bagian PBJ											1.310.774.552	1.392.152.439				
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											1.310.774.552	1.392.152.439			2.061.601.794	
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	0 Dokumen	190 Dokumen	100 Persen (%)	100 Persen (%)	649.706.599	670.026.599		Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	1.238.289.161
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Capaian Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen (%)	100 Persen (%)	224.540.658	285.598.545		Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	356.135.902

4	01	03	2,03	03	Pembi naan dan Advoka si Penga daan Barang dan Jasa	Persenta se pelaksa naan pengad aan barang/j asa pemerin tah Kabupat en Tanah Laut secara elektron ik	Jumlah Fasilitasi Pembin aan SKPD dalam Pengad aan Barang/ Jasa Pemerin tah Jumlah Fasilitasi Pengelo laan personil Bagian Pengad aan Barang/ Jasa Jumlah Orang yang Mengik uti Pembin aan dan Advokas i Pengad aan Barang dan Jasa	Persent ase Capaian Pengad aan Barang/ Jasa secara elektron ik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	100 persen	100 persen	40 SKPD 20 Orang 0 Orang	40 SKPD 20 Orang 0 Orang	100 Persen (%)	100 Persen (%)	436.527.295	436.527.295	Persen tase pelaks anaan penga daan baran g/jasa pemer intah Kabup aten Tanah Laut secara elektr onik	100 persen	467.176.731
TOTAL																76.738.502.712	85.460.903.356			82.265.529.667

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon II Tahun 2023

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8 inovasi	800%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	Nilai belum terbit dari KEMENDAGR I	Nilai belum terbit dari KEMENDAGR I
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	100	0	0
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	0	0
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP	Masih dalam tahap <i>Baseline</i> SPIP
7	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Total				240.72%

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon III Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-1 "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya"
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	83.67%	83.67%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	100%	100%	
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	
8	Meningkatnya Kerjasama	Persentase Dokumen Kerjasama antar	100%	208%	208%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti				
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	100%	80%	80%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Perubahan minimal 60	50%	0	0	
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	
12	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
13	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.7	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan
16	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	100%	100%	100%	Yang Baik (Good Governance)"
18	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
19	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	71%	71%	
20	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
21	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
22	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	
23	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 76	Nilai 81,95	107.82%	
24	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolkan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	0%	0%	0%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	
25	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	98.04%	98.04%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke- 3 :

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98.09%	98.09%	"Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
27	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	83.01%	83.01%	
28	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	98%	98%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
29	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	100%	95%	95%	
30	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	100%	100%	100%	
31	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	85%	100%	100%	

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon IV Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70822 Ok	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat	91 Jenis	91Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Daerah	Daerah				Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2468 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Aset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubbag Aset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	5.827 surat	5.827 surat	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	260 Kali	260Kali	104%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	250 kali	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.600 Surat	3.772 surat	107%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	103 Dokumen	126 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona IntegritasSekretariat Daerah	90 Dokumen	96 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
13	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	249 Paket	166%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
14	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
15	Kegiatan keprotokolkan KDH/WKDH yang	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani	360 Kali	360 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terlayani	keprotokolannya				Pimpinan Kasubbag Protokol
16	Pelayanan tamu yang terlayani KDH/WKDH	Jumlah tamu yang terlayani dengan baik KDH/WKDH	24 Kali	24 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kasubbag Protokol

1.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Capaian Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023}} \times 100\%$	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	Kontrak 0 kontrak	0	Tidak ada kontrak konstruksi di atas 50 Milyar Rupiah
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	5488 Kontrak		
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (> 50 Juta)	1879 paket	34,24	Data diambil dari sirup.lkpp.go.id
			Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif (≤ 50 Juta)	5488 paket		
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang dilakukan melalui pengadaan}}{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang dilakukan melalui pengadaan}} \times 100\%$	Jumlah nilai langsung yang dilakukan melalui pengadaan	883,641,136,968.18	57.52	Data belum didapatkan dari BPKAD

		Total belanja langsung				
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barangjasa Pemerintah Daerah	<p>Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023</p> <hr/> <p>Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	<p>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan PDN, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun 2023</p> <p>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan PDN, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun 2022</p>	<p>1.033.172.966.400</p> <p>639.450.146.813</p>	61,57	

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPj kepada DPRD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, atas Laporan kemajuan yang telah dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menciptakan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2023.

2. Penghargaan dan Inovasi

Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan (Predikat BAIK) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

NO	NILAI ITKP		PENINGKATAN
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	77,9	80.8	2,9

- 2) Penghargaan Dari Menpanrb Republik Indonesia Kepada Dpmpstsp Kabupaten Tanah Laut Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2022
- 3) Penghargaan Dari Ombudsman Republik Indonesia Kepada Dpmpstsp Kabupaten Tanah Laut Untuk Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Zona Hijau Kualitas Tertinggi (Nilai 91,55)
- 4) Penghargaan Dari Menpanrb Republik Indonesia Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2022
- 5) Penghargaan Dari Ombudsman Republik Indonesia Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Untuk Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Zona Hijau Kualitas Tertinggi (Nilai 91,53):
- 6) Penghargaan Universal Health Coverage (Uhc) Award Dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko Pmk) Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- 7) Top BUMD Bintang Empat Kepada PT. BPR Tanah Laut Dari Top Business Indonesia
- 8) Top BUMD Bintang Empat Kepada Ptam Berkah Banua Dari Top Business Indonesia
- 9) Top Pembina BUMD 2023 Kepada Bupati Tanah Laut Dari Top Business Indonesia
- 10) The Best Leader Replace Energy Pada Ajang Indonesia Green Award (Iga) 2023 Kepada Bupati Tanah Laut Dari La Tofi School Of Social Responsibility
- 11) Penghargaan Bakti Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dari Menteri Koperasi Dan UKM RI Kepada Bupati Tanah Laut
- 12) Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2022 Dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dan Merupakan Pencapaian Ketiga kalinya Secara Berturut-Turut
- 13) Penghargaan Proklamasi Lestari Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepada Dusun 1 Asri Mulya Kecamatan Jorong Dan Rw 4 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari.
- 14) Penghargaan Proklamasi Utama Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepada Desa Sungai Bakar, Galam Kecamatan Bajuin, Dan Sumber Makmur Kecamatan Takisung
- 15) Penghargaan Proklamasi Madya Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepada Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau, Desa Batalang, Jorong, Swarangan, Dan Karang Rejo Kecamatan Jorong.

- 16) Penghargaan Kategori Pendukung Program Kampung Iklim Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Kepada Pt Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam
- 17) Tiga Terbaik Kategori Dukungan Program Dan Anggaran Yang Memprioritaskan Pemenuhan Air Minum Daerah Dan Program Nuwsp Dari Kementerian Dalam Negeri
- 18) Sertifikat Desain Industri Kopiah Tuntung Pandang (Kondang) Dari Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia
- 19) Satyalancana Wira Karya Atas Kontribusinya Di Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dan Percepatan Penurunan Stunting Dari Presiden Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 20) Terbaik 3 Praktik Baik Audit Kasus Stunting (Petik Aksi) Seri II Tahun 2023 Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut BKKR Republik Indonesia
- 21) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Pratama Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 22) Penghargaan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Kepada Desa Bumi Jaya Sebagai Desa Anti Korupsi, Dan Menjadi Satu-Satunya Desa Di Kalimantan Yang Mendapat Penghargaan Tersebut
- 23) Penghargaan UKPBJ Kabupaten Tanah Laut Kategori Pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Pemerintahan dengan Kategori Baik dari Gubernur Kalimantan Selatan
- 24) Terbaik II Kalimantan Selatan Selatan Inovation Award (KIA) Kategori Pelayanan Publik 2023

- 25) Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari Gubernur
- 26) Penghargaan Digital Inovasi Award (DIA) Kategori Digital In Innovation For Public Service untuk Aplikasi Sosialita

Pelaihari, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012